



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10935-10945
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Nagari: Studi Kasus Pada Nagari Tigo Koto Silungkang

Hajar Aswad¹, Eka Siskawati²✉, Syafira Ramadhea Jr³, Reno Fithri Meuthia⁴
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia
Email: ekasiskawati@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, banyak pemerintah desa yang masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi SIMDA desa yang lebih dikenal dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peran teknologi informasi. . (Aplikasi Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Yang telah mengimplementasikan aplikasi siskeudes pada tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada kepala nagari, bendahara dan petugas nagari yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Selain itu, dokumen dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi juga dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa menjadi lebih akurat dan detail. Hal ini membantu meminimalkan potensi penipuan dan penyalahgunaan dana desa. Selain itu, aplikasi ini juga meningkatkan transparansi karena laporan keuangan dapat dipantau oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui online, sehingga memungkinkan mereka memantau penggunaan anggaran desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Aplikasi Siskeudes, Pengelolaan Keuangan Desa.*

Abstract

In the practice of village financial management, many village governments still experience delays in preparing village financial management. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)* with *Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri* have develop the village *SIMDA* application, which is better known as the *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*, therefore this research aims to conduct research on the role of information technology. (Siskeudes application) in increasing village financial accountability. This research was conducted in Nagari Tigo Koto Silungkang, Palembang sub-district, Agam district. Which has implemented the siskeudes application in 2017. This research method uses a qualitative approach. Data was collected through interviews with the nagari head, treasurer and nagari officers involved in using the Siskeudes application. In addition, financial documents and reports generated by the application are also analyzed. The research results show that the Siskeudes application has a significant role in increasing village financial accountability. This application allows more accurate and detailed recording of village financial receipts and expenditures. This helps minimize the potential for fraud and misuse of village funds. Apart from that, this application also increases transparency because financial reports can be monitored by local governments and the central government via online, thus enabling them to monitor the use of village budgets in managing village finances.

Keywords: *Accountability, Siskeudes Application, Village Financial Management.*

PENDAHULUAN

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah desa diberikan peluang untuk mengelola tata pemerintahannya, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam praktik pengelolaan keuangan desa masih banyak pemerintahan desa yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan pusat dan daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat (Dana & Hasniati, 2016). Ini melibatkan pemantauan dan pelaporan yang teratur oleh pemerintahan pusat dalam pengawasan

kinerja pemerintah desa. Perwujudan dari akuntabilitas menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan desa dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah (Maghfurianam & Setiawan, 2018). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, minim keputusan politik dan tingginya tindakan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tidak hanya alokasi dana desa yang besar setiap tahunnya akan tetapi tidak adanya prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (ICW, 2023). Faktor lain kurangnya perhatian media massa yang berskala nasional dalam meliputi permasalahan pengelolaan dana desa, afiliasi kepala desa dengan pemerintah daerah serta minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi SIMDA Desa, yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang diluncurkan sejak tahun 2015. Semua desa yang ada di Indonesia seharusnya sudah menggunakan aplikasi Siskeudes yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban, Kementerian Dalam Negeri, bersama BPKP mendorong akuntabilitas pada tingkat desa dalam hal efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan desa yang diukur menggunakan empat indikator akuntabilitas manajerial yaitu, peran yang jelas, harapan dan kinerja yang jelas, pelaporan kredibel, ulasan wajar dan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan desa pada Nagari Tigo Koto Silungkang.

Sebelum adanya aplikasi Siskeudes, pemerintah desa membuat pencatatan dan pelaporan keuangan desa menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyulitkan pemerintahan kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi dan pengawasan APBDes dan laporan keuangan desa. Hal ini juga dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Agam tepatnya di Nagari Tigo Koto Silungkang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hadirnya aplikasi Siskeudes membantu pemerintah Nagari Tigo Koto Silungkang dalam mengakomodir seluruh regulasi terkait keuangan desa yang dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian internal. Namun berbagai kendala dialami oleh pemerintah dalam proses adopsi sistem baru ini. Akses internet yang sangat

terbatas menjadi kendala petugas bagian akuntansi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi berbasis internet. Kendala yang berkaitan dengan kesiapan petugas pemerintah desa dalam mengadopsi sistem baru yang berbasis teknologi internet. Nagari Tigo Koto Silungkang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes. Nagari Tigo Koto Silungkang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2017. Namun proses implementasi dan adaptasi sistem keuangan tersebut hingga saat ini masih berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Nagari, ditengah dinamika peningkatan kompetensi petugas Desa.

Akuntabilitas dan Stewardship Teori

Akuntabilitas merupakan konsep yang penting dalam membantu organisasi memberikan manfaat kepada stakeholder, memberikan akses informasi tentang kinerja mereka, dan bersikap lebih responsive terhadap ekspektasi dan tuntutan stakeholder [1]. Organisasi profit masih menjadi bahan kajian utama dalam akuntabilitas. Namun, organisasi non profit juga semakin menarik dalam kajian akuntabilitas karena relasinya terhadap terhadap visi keuangan [2]. Akuntabilitas dipahami dan dibentuk secara dinamis. Oleh pihak internal dan eksternal organisasi, sehingga sangat wajar apabila bentuk akuntabilitas akan berbeda pada organisasi dan konteks yang berbeda [3].

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber dana keuangan desa untuk memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta penjelasan atas kinerja dan keputusan yang diambil [4]. Dalam konteks instansi pemerintah, akuntabilitas memiliki fungsi-fungsi utama yang cukup penting antara lain sebagai alat monitor untuk mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab seseorang [5], untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang memungkinkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memegang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa [6].

Namun, mekanisme akuntabilitas, dari domain kebijakan tertentu, reformasi di seluruh pemerintah, hingga tata kelola jaringan, tidak selalu berfungsi dengan baik tetapi telah cacat secara sistematis dalam banyak kasus untuk sektor publik. Semakin tinggi tanggungjawab pengelola dana, maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana tersebut [7]. Defisit dalam mekanisme akuntabilitas yang diterapkan pada pengaturan kelembagaan telah

menjadi masalah yang berarti di sektor publik. Dengan demikian, konsekuensi dari lemahnya pengawasan terhadap akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja lembaga di sektor publik [8].

Stewardship Theory adalah harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama [9]. Secara implisit teori ini merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruksi pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi shareholder dan manajemen. Pola tersebut juga bisa terjadi antara top manajemen dengan jajaran manajemen lain di bawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak.

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Steward berkomitmen dan berupaya untuk memaksimalkan tujuan organisasi yang ditandai dengan keterlibatan tinggi dalam organisasi [10]. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan pemerintah daerah/pusat dan masyarakat selaku principal pemilik sumber daya. Adanya kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan pemerintah daerah/pusat/masyarakat (principal) berdasarkan kepercayaan dan kolektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada masyarakat. Teori stewardship juga dapat diterapkan dalam konteks meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Ini berarti bahwa para pihak yang bertanggung jawab atas keuangan desa harus bertindak sebagai "penjaga" yang baik terhadap sumber daya keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik (Permendagri, 2018). Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, terdapat azaz-azaz yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yakni (i) transparan, informasi keuangan desa yang transparan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas, (ii) akuntabel, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (iii) partisipatif, dengan mengikutsertakan kelembagaan dan unsur masyarakat desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan (iv) tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menggunakan teknologi informasi yang dinamakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah berubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga terciptanya pemerintahan desa yang lebih akuntabel yang diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Wardana & Atmadja, 2022). Selain itu, pemanfaatan aplikasi SISKEUDES ini sangat membantu pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan menghindari kemungkinan besar terjadinya kehilangan data keuangan (Ayem & Amahala, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada Pemerintahan Nagari Tigo Koto Silungkang. Pada penelitian ini akan menggunakan empat indikator akuntabilitas manajerial yaitu Peran yang jelas, Harapan dan kinerja yang jelas, Pelaporan Kredibel, Ulasan Wajar dan Pengecualian. Objek penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Informan yang dipilih adalah petugas nagari yang berhubungan langsung dengan penggunaan aplikasi Siskeudes

Menurut Junaedi (2018:77) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif terdapat beberapa bagian salah satunya, Metode Studi Etnografi, merupakan suatu metode yang menjelaskan dan mengklasifikasikan kelompok sosial, budaya maupun sistem. Proses penelitian studi Etnografi dijalankan dalam waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan partisipan, dalam beraneka macam bentuk peluang aktivitas dan menghimpun dokumen dan benda seperti artefak. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Merupakan

kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumentasi, hasil tes, rekaman, oral histori dan lainnya, sebagai berikut : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi siskeudes membantu pemerintah dalam penyiapan laporan keuangan

Hasil temuan memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi informasi ini sangat berpengaruh terhadap petugas nagari tigo koto silungkang dalam menyiapkan laporan keuangan nagari. Teknologi informasi yang dikeluarkan oleh BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu Aplikasi Siskeudes yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa di seluruh Indonesia dalam pengelolaan keuangan desa. Teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah nagari tigo koto silungkang yaitu aplikasi sikeudes keuangan desa yang telah dibuat oleh BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Hadirnya aplikasi siskeudes di seluruh desa di Indonesia dapat membantu tugas dari pemerintah desa dalam menyiapkan laporan keuangan. Aplikasi siskeudes telah diluncurkan oleh BPKP pada tahun 2015. Pemerintah Nagari tigo koto silungkang telah menggunakan aplikasi siskeudes dimulai dari tahun 2017. Hadirnya aplikasi siskeudes di nagari tigo koto silungkang bertujuan membantu pemerintah Nagari dalam menyiapkan laporan keuangan desa. Berikut ini peranan teknologi informasi atau Aplikasi siskeudes di nagari tigo koto silungkang yang diterapkan oleh pemerintah.

Petugas Nagari sebelum mengenal aplikasi siskeudes, mereka menyiapkan laporan hanya pakai manual. Ketika menyiapkan laporan manual tersebut mereka harus membuatnya satu persatu dan itu sangat memakan waktu. Untuk membuat laporan harian saja bisa sampai beberapa hari. Petugas nagari harus mengerjakan laporan serba manual, yang nantinya mereka print dulu dan jika terjadi kesalahan mereka harus ngeprint ulang laporan yang mereka kerjakan. Setiap hari, petugas Nagari setiap hari menyiapkan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan. Petugas Nagari menyiapkan laporan keuangan mereka dengan menggunakan laptop masing-masing. Namun, mereka masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat rekapan dulu sebelum di inputkan ke dalam aplikasi siskeudes. Hal ini diungkapkan oleh informan-1 :

“ sebelum di-inputkan ke aplikasi siskeudes, saya harus menyiapkan laporan menggunakan Microsoft Excel”

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan-3 yang merupakan petugas Nagari Tigo Koto Silungkang:

"tahun 2008 saya sudah bekerja disini (kantor Kepala Desa)... waktu itu laporan keuangan disiapkan secara manual... waktu itu saya menjabat sebagai seorang bendahara... Kemudian saya berhenti karena menikah dan harus fokus mengurus keluarga. Namun sekarang, saya kembali lagi bekerja disini... siskeudes sudah ada. Ternyata lebih mudah dengan siskeudes dibanding manual dulu"

Petugas nagari merasa pekerjaannya lebih cepat dan hemat waktu dalam menyiapkan laporan keuangan. Hal ini tentunya membantu meningkatkan akuntabilitas keuangan nagari. Yang mana akuntabilitas dalam hal ini adalah akuntabilitas manajerial, indikator dari akuntabilitas manajerial yaitu, Peran yang jelas, dalam pengelolaan Siskeudes, sudah terdapat peran yang jelas diantara perangkat nagari. Penginputan data ke Siskeudes merupakan tanggung jawab dari bendahara. Hasil dari yang diinput akan di review oleh sekretaris. Setelah itu akan disahkan oleh wali nagari. Harapan dan kinerja yang jelas, Target dari penggunaan Siskeudes adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan Kredibel, Pemerintah nagari melakukan transaksi setiap hari yang nantinya akan mereka inputkan ke dalam aplikasi Siskeudes. Laporan yang sudah di print kemudian dikirim dalam bentuk hardcopy ke kecamatan, untuk mencocokkan laporan dengan SPJ. Ulasan wajar dan Penyesuaian, Laporan yang telah di cek oleh kecamatan jika ada kesalahan akan diperbaiki lagi dan dikirim ulang ke kecamatan.

Dari indikator yang dijelaskan hasil penelitian ini menemukan ada tiga point penting yang menjadi hasil penelitian ini. Diantaranya, Peran teknologi informasi dalam pemerintah nagari dalam meningkatkan akuntabilitas seperti teknologi membantu pemerintah nagari dalam meningkatkan akuntabilitas, membantu arah gerak dari pemerintah nagari karena terdapat fitur yang memudahkan pemerintah nagari, membantu meningkatkan pengawasan keuangan nagari yang sudah bisa diakses oleh pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan penggunaan aplikasi Siskeudes Offline dan Online, dan Hambatan pemerintah nagari dalam penggunaan aplikasi Siskeudes upaya meningkatkan akuntabilitas.

Teknologi Siskeudes membantu arah gerak dari pemerintah Nagari dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Nagari

Penggunaan aplikasi siskeudes membantu pemerintah nagari dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, implementasi teknologi Siskeudes menjaikan kegiatan nagari lebih terstruktur. Hal ini karena penggunaan Siskeudes memberikan kemudahan dari petugas nagari dalam menyusun kegiatan pemerintah nagari sampai menjadi sebuah laporan keuangan. Petugas Nagari membuat suatu kegiatan dalam nagari mereka akan melakukan

rapat dengan tokoh masyarakat untuk menentukan kegiatan yang nantinya akan mereka lakukan. Setelah melakukan rapat dengan tokoh adat dan masyarakat petugas Nagari nanti akan mencocokkan dengan aplikasi Siskeudes nantinya apakah kegiatan tersebut bisa dijalankan. Penggunaan aplikasi Siskeudes ini dalam tahap perencanaan harus sesuai dengan ketentuan dari aplikasi Siskeudes, jika tidak sesuai maka anggaran tersebut tidak bisa dianggarkan dan tidak dapat diinputkan dalam aplikasi Siskeudes. Hal ini diungkapkan oleh informan-5 :

"...nah kenapa tidak bisa?... di Siskeudes itu sudah dijelaskan... jadi kita harus bijaksana. Sementara itu... sesuai arahan presiden... kita membeli baju seragam dan itu tidak bersifat darurat... jadi istilahnya, di kampung ini, kalau uang berlebih apalagi kalau hal itu tidak penting, maka tidak bisa [diinput ke Siskeudes]..."

Hal ini juga dikonfirmasi oleh informan-1, bahwa aplikasi Siskeudes sangat ketat:

"...hal yang bersifat tidak penting dan bertolak belakang dengan Siskeudes... [tidak dapat diproses]"

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh informan-3:

"... berikutnya... seperti jika kita menganggarkan pembangunan kantor Wali Nagari [Kepala Desa]... nah, kantor ini adalah pinjaman... sementara dana untuk membangun kantor Wali Nagari...perkiraan saya 1,6 miliar. Jadi di Siskeudes memang tidak ada dana untuk pembangunan kantor Wali Nagari... sesuai instruksi Presiden... Kantor desa tidak perlu bagus jika masyarakat lebih membutuhkan..."

Aplikasi Siskeudes, membantu arah gerak bagi Nagari dalam menjalankan kegiatannya, agar nantinya saat menyiapkan laporan keuangan memudahkan tugas petugas Nagari. Aplikasi Siskeudes membantu Nagari dalam menyiapkan laporan keuangan setelah melaksanakan kegiatan. Dalam wawancara yang dilakukan, petugas Nagari merasakan bahwa dengan adanya aplikasi ini mereka sangat terbantu dalam melaksanakan pekerjaan. Karena memang dalam aplikasi Siskeudes memiliki fitur-fitur yang mudah dipahamai dimulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pelaporan yang nantinya bisa menghasilkan output .

SIMPULAN

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan penulis, tentang analisis peran teknologi informasi (aplikasi siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa pada studi kasus nagari tigo koto silungkang sangat membantu pemerintah nagari dalam menyiapkan laporan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas. Dan penggunaan teknologi informasi (aplikasi siskeudes) yang otomatisasi yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Hal ini berhubungan dengan teori stewardship dalam penggunaan aplikasi siskeudes yaitu Transparansi, tanggung jawab pemangku kepentingan dan pengelolaan keuangan yang bijak dalam penggunaan aplikasi siskeudes yang efektif dan efisien. Dengan penggunaan aplikasi siskeudes meningkatkan akuntabilitas keuangan desa pada nagari tigo koto silungkang dalam indikator akuntabilitas manajerial karena pengawasan yang lebih ketat yang mana pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa pada aplikasi siskeudes sudah bisa diawasi oleh pemerintah pusat dan BPKP setiap hari saat hari jam kerja hal ini tentunya meningkatkan akuntabilitas keuangan desa pada nagari tigo koto silungkang.

DAFTAR PUSTAKA

- M. K. Dewi, M. Manochin, and A. Belal, "Towards a conceptual framework of beneficiary accountability by NGOs: An Indonesian case study," *Crit. Perspect. Account.*, vol. 80, p. 102130, 2021, doi: 10.1016/j.cpa.2019.102130.
- G. Plaisance, "Accountability in French non-profit organizations: between paradox and complexity," *J. Appl. Account. Res.*, 2023, doi: 10.1108/JAAR-01-2023-0006.
- S. C. Kuruppu and S. Lodhia, "Shaping accountability at an NGO: a Bourdieusian perspective," *Accounting, Audit. Account. J.*, vol. 33, no. 1, pp. 178–203, 2020, doi: 10.1108/AAAJ-09-2016-2696.
- I. Asmawati and P. Basuki, "Akuntabilitas pengelolaan dana desa," vol. 2, no. 1, pp. 63–76, 2019.
- Y. Mursalim and A. Junaid, "YUME : Journal of Management Pengaruh Akuntabilitas Keuangan , Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan," vol. 5, no. 2, pp. 477–494, 2022, doi: 10.37531/yume.vxix.344.
- S. F. Manisa, J. Manaroinsong, and M. Sumual, "AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA," *J. Akunt. Manad.*, vol. 1, no. 2, pp. 8–12, Nov. 2020, doi: 10.53682/jaim.v1i2.362.
- T. Fait, A. R. Septiana, and R. Tohopi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)," *J. Adm. Negara*,

vol. 9, no. 1, pp. 102–114, 2021.

- R. H. Seno, "New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik," *Cakrawala*, vol. 16, no. 1, pp. 43–69, 2022, doi: 10.32781/cakrawala.v16i1.407.
- T. Schillemans and K. H. Bjurstrøm, "Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies," *Int. Public Manag. J.*, vol. 23, no. 5, pp. 650–676, 2020, doi: 10.1080/10967494.2018.1553807.
- A. S. K. Löhde, G. Campopiano, and A. Calabrò, "Beyond agency and stewardship theory: shareholder–manager relationships and governance structures in family firms," *Manag. Decis.*, vol. 59, no. 2, pp. 390–405, 2021, doi: 10.1108/MD-03-2018-0316.